

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN REGULER
HAKIM PENGAWAS BIDANG PELAYANAN PUBLIK,
UMUM DAN KEUANGAN,
PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN**

TRI WULAN II

(April s/d Juni 2023)



PENGADILAN AGAMA MAROS

2023

**LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER
HAKIM PENGAWAS BIDANG PELAYANAN PUBLIK,
UMUM DAN KEUANGAN, PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN
TANGGAL: 19 Juni s/d 27 Juni 2023**

I. PELAYANAN PUBLIK

a. Pelayanan Pihak Eksternal PT. POS.

Kondisi:

Belum ada petugas dari PT POS pada layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama Pasal 22 dan Pasal 23.

Sebab:

Upaya kerja sama dengan PT POS masih belum optimal.

Akibat:

Pihak berperkara belum terlayani secara maksimal dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Rekomendasi:

Agar segera meninjau ulang MOU dan membangun komunikasi dengan PT POS.

b. Pelayanan Pihak Eksternal Bank Mandiri Cabang Maros

Kondisi:

Petugas Bank Mandiri Cabang Maros pada PTSP Pengadilan Agama Maros hanya sampai Pukul 12.00. WIB, sementara waktu jam layanan sampai Pukul 16.30.

Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebab:

Bank Mandiri Cabang Maros tidak melaksanakan MOU sebagaimana mestinya.

Akibat:

Pihak berperkara belum terlayani secara maksimal dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Rekomendasi:

Agar segera meninjau ulang MOU dan membangun komunikasi dengan Bank Mandiri Cabang Maros.

c. Laporan Penyelenggaraan PTSP**Kondisi:**

Laporan Penyelenggaraan PTSP belum dibuat secara periodik dan berjenjang.

Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama Pasal 42.

Sebab:

Pengelola PTSP belum memahami kewajiban membuat laporan.

Akibat:

Pimpinan tidak bisa mengetahui secara akurat jumlah pengguna layanan, jenis layanan yang diberikan, dan kendala yang dihadapi setiap bulannya;

Rekomendasi:

Agar segera membuat laporan bulanan penyelenggaraan PTSP dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

II. UMUM

a. Kondisi:

Kebersihan setiap ruangan dan toilet sudah terlaksana dengan baik namun baik petugas kebersihan dan pengawas kebersihan setiap ruangan dan toilet tidak pernah mengisi cek list kebersihan ruangan dan kebersihan toilet.

Kriteria:

- BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan Kantor Pengadilan Agama Maros (SOP/AS/19)

Sebab:

Tidak konsisten melaksanakan mekanisme dan sistem pengelolaan kebersihan ruangan berdasarkan pedoman Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama

Akibat:

Sistem dan Mekanisme kebersihan tidak berjalan sesuai dengan BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dan dan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan Kantor (SOP/AS/19).

Rekomendasi:

Agar Kasubag. Umum dan Keuangan memonitor pelaksanaan kebersihan setiap ruangan dan toilet serta mengecek chec list kebersihan ruangan dan toilet.

b. Pengelolaan Petugas Piket Persidangan

Kondisi:

Petugas piket persidangan sudah bertugas dengan baik hanya tidak terlihat adanya cek list perlengkapan persidangan, dan masih ditemukan keadaan dimana majelis hakim sudah siap bersidang namun sarana penunjang persidangan belum siap seperti sound sistem yang belum siap, AC yang belum ON, PC Komputer belum ON, dan tata kursi para pihak yang belum siap.

Kriteria:

- BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17)

Sebab:

Tidak konsisten melaksanakan mekanisme dan sistem pengelolaan pemeliharaan keamanan sebagai mana Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17).

Akibat:

Sistem dan Mekanisme pengelolaan keamanan tidak berjalan sesuai dengan BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17)

Rekomendasi:

Agar Kasubag. Umum dan Keuangan menyusun jadwal Petugas piket persidangan dan check list sarana persidangan dan menyerahkannya kepada petugas piket persidangan serta memastikan piket persidangan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17) sebagaimana mestinya.

II. KEUANGAN**a. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengelola Keuangan****Kondisi:**

Kuasa Pengguna Anggaran bersama Tim pengelola keuangan belum melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran periode bulan April, Mei dan Juni tahun 2023.

Kriteria:

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sebab:

Tidak konsisten melaksanakan agenda rapat evaluasi anggaran.

Akibat:

Tim pengelola keuangan tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntable.

Rekomendasi:

Agar Kuasa Pengguna Anggaran beserta Tim Pengelolaan Keuangan mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara konsisten setiap bulannya.

b. Transparansi Keuangan.**Kondisi:**

Sudah ada papan transparansi dokumen DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran tahun berjalan, namun realisasi anggaran bulan April dan Mei 2023 belum dipublish di TV Media Ruang pelayanan Publik.

Kriteria:

- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab:

Pengelola keuangan lalai dalam hal transparansi keuangan.

Akibat:

Transparansi keuangan belum dapat dilihat pada TV Plasma ruang Pelayanan Publik sebagai media informasi website;

Rekomendasi:

Agar segera mengupload realisasi anggaran bulan April dan Mei 2023 pada TV Media pada ruang pelayanan Publik Pengadilan Agama Maros dan website Pengadilan Agama Maros.

III. PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

a. Pelaporan

Kondisi:

Sudah ada papan transparansi dokumen DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran tahun berjalan, namun DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran bulan Januari, Februari, Maret April, dan Mei 2023 belum dipublish di TV Media Ruang pelayanan Publik.

Kriteria:

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab:

Pengelola Pelaporan lalai dalam hal pelaksanaan pelaporan.

Akibat:

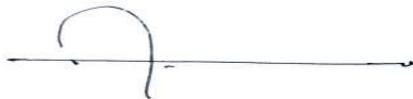
Transparansi keuangan belum dapat dilihat pada TV Plasma ruang Pelayan Publik sebagai media informasi;

Rekomendasi:

Agar segera DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2023 pada TV Media pada ruang pelayanan Publik Pengadilan Agama Maros.

Maros, 27 Juni 2023

Hakim Pengawas
Bidang Pelayanan Publik, Umum Dan Keuangan,
Perencanaan TI Dan Pelaporan



Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
HAKIM PENGAWAS : Ahmad Zaki Yamani, S.H.
Tanggal 22 Mei 2023 – 26 Mei 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros Nomor W20-A5/2053/KP.01.1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

B. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
2. Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara
3. Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4. Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- b) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- c) Menilai kinerja.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
HAKIM PENGAWAS : Ahmad Zaki Yamani, S.H.
Tanggal 22 Mei 2023 – 26 Mei 2023

2. Tujuan Pengawasan

- a) Menjamin agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan.

D. Metodologi Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan bidang dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dalam bentuk checklist terhadap objek pemeriksaan dan wawancara langsung terhadap obrik pemeriksaan.

E. Tempat dan Waktu Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan Triwulan ke II dilaksanakan pada hari/tanggal Rabu- Jum'at 24 s.d. 26 Mei 2023 di Pengadilan Agama Maros.

F. Hakim Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros kelas I B sebagaimana terlampir

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
HAKIM PENGAWAS : Ahmad Zaki Yamani, S.H.
Tanggal 22 Mei 2023 – 26 Mei 2023

BAB II
HASIL PENGAWASAN

1. MINUTASI DAN ARSIP PERKARA

KONDISI

- Secara Umum berkas perkara yang sudah di minutasikan sudah diserahkan kepada meja III untuk di arsipkan, namun belum disimpan ke ruangan arsip;

KRITERIA

- Buku II tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama

SEBAB

- Belum ada lemari arsip yang tersedia, lemari arsip yang ada sudah penuh dan padat isinya;

AKIBAT

- Berkas perkara masih tersimpan di ruangan Panmud

REKOMENDASI

- Untuk disediakan lemari untuk arsip dan Ruang arsip untuk diadakan pembenahan;

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
HAKIM PENGAWAS : Ahmad Zaki Yamani, S.H.
Tanggal 22 Mei 2023 – 26 Mei 2023

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. Kesimpulan

1. Berkas Perkara harus segera untuk dibenahi dan diletakkan pada ruangan arsip supaya tidak terlihat berantakan dan berserakan;

II. Rekomendasi

1. Perlu adanya pembenahan ruangan arsip sesuai yang direkomendasikan.

Demikian laporan pengawasan ini dibuat untuk segera ditindaklanjuti.

Maros, 26 Juni 2023

Hakim Pengawas Bidang,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

**HASIL TEMUAN HAKIM PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI
PERSIDANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023**

1. Kondisi :

Ruang sidang masih biasa ditemukan kurang bersih dan kurang rapih misalnya meja sidang terkadang berdebu atau kertas yang tidak terpakai ada diatas meja atau dilaci meja sidang, begitu pula alat elektronik seperti aplikasi panggilan sidang supaya dinyalakan sebelum sidang dimulai.

Kriteria :

Seharusnya ruang sidang selalu dijaga kebersihan dan kerapihannya karena setiap hari digunakan untuk bersidang dan aplikasi SIPP dinyalakan untuk memperlancar persidangan.

Sebab : kebersihan dan kerapihan ruang sidang serta aplikasi SIPP kadang tidak diperhatikan.

Akibat : kurang nyaman dan menghambat jalannya persidangan.

Rekomendasi :

Agar diperhatikan dan ditindaklanjuti.

2. Kondisi :

Ruang sidang 2 juga masih biasa ditemukan kurang bersih, tidak rapih atau tidak dinyalakan lampunya sehingga terkadang mau digunakan sidang ruang sidang masih gelap dan tidak rapih.

Kriteria :

Seharusnya : ruang sidang 2 tetap selalu dibersihkan dan dirapihkan serta dinyalakan lampunya terutama jika ada majelis atau hakim yang mau bersidang sedangkan ruang sidang 1 terpakai.

Sebab : kurang diperhatikan oleh petugas sidang.

Akibat :

Menghambat jalannya persidangan.

Rekomendasi :

Supaya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk.

3. Kondisi :

Sebenarnya Panitera Pengganti sudah siap pada hari persidangan hanya saja terkadang masih ada yang terlambat masuk ruang sidang pada saat pergantian Panitera Pengganti.

Kriteria :

Seharusnya : Panitera Pengganti siap pada saat gilirannya sidang dan tidak perlu menunggu panggilan untuk sidang.

Sebab : Terkadang Panitera Pengganti yang bersidang tidak berada ditempat.

Akibat : Persidangan tidak berjalan lancar.

Rekomendasi : Agar PP memperhatikan jika ada perkaranya yang akan disidangkan.

Maros, 28 Juni 2023

Koordinator Pengawas,

Hakim Pengawas Bidang,

Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

**TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

Segere mungkin diterbitkan SK biaya perolehan informasi.

1. Kondisi
Belum diterbitkan SK biaya perolehan informasi
2. Kriteria
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang instruksi implementasi keterbukaan informasi pada kalangan pengadilan.
3. Sebab
Ada Kelalaian
4. Akibat
Pengadilan Agama Maros belum berpedoman pada aturan yang berlaku.
5. Rekomendasi
Sesegera mungkin dibuatkan SK biaya perolehan informasi.

Uraian tugas belum dibuat menyeluruh.

1. Kondisi
Belum dibuat uraian tugas secara menyeluruh kepada semua pegawai.
2. Kriteria
Semua pegawai dibuatkan Job description agar jelas acuan kerjanya.
3. Sebab
Ada Kelalaian
4. Akibat
Pegawai tidak mengetahui dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan.
5. Rekomendasi
Agar segera membuat uraian tugas masing-masing pegawai.

Maros, 30 Juni 2023
Hawasbid

Mahyuddin.